

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Soetomo. (1990). *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Pustaka Kartini.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung.
- Achmad S. Soema Di Pradja. (1981). *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni.
- Agus Takariawan. (2019). *Hukum Pembuktian : Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Andi Hamzah. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Munawarman. (n.d.). *Sejarah Singkat POLRI*. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.
- Ansorie. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.
- Ashar, D., Ashila Bestha, I., & Pramesa Gita, N. (2019). *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGADILAN*. 1–113.
- Bambang Poernomo. (1985). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku.
- Banurusman. (1995). *Masyarakat dan Polisi Negara*. Biagraf Publishing.
- Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bisri Ilham. (1998). *Sisten Hukum Indonesia*. Grafindo Persada.
- C. Djisman Samosir, S.H., M. H. (2018). *Hukum Acara Pidana* (Cetakan 1). Nuansa Aulia.

- Charlos Reith. (1975). *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*. Patterson Smith Series.
- D. Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*. P. Noordhoff.
- Damanhuri Fattah. (2013). 'Teori Keadilan Menurut John Rawls.' Jurnal TAPIs 2.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- EMILDA KUSPRANINGRUM, H. R. S. (2007). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum, 1, 3*.
- Endang Rochyadi. (2005). *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*. Depdiknas.
- Fikry Latukau. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *LAHKIM, XV(1), 10*.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum, 11, 6*.
- Gerson W. Bawengan. (1977). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita.
- Hartono Hadisoeparto. (1999). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.
- Iqbal Hasanuddin. (2018). *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1587764>
- Jhon Rawls. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.

- John Rawls. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Ed). OUP.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *KBBI*.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (1990). *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Gadjah Mada University.
- Lawrence M.Friedman. (2001). *American law An Introduction (Hukum Amerika sebuah pengantar)*. PT Tata Nusa.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2006). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana*. PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis, dan Praktik)* (Edisi Pert). Alumni.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan Ke). Kencana.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (cet. 2). Ghalia Indonesia.
- Malinda, A., Nurfitriana, E., & Arif, M. Y. Al. (2014). Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 465–484.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art7>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Momo Kelana. (1972). *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu*

*studi Histories Komperatif*. PTIK.

- Mumpuniarti. (2000). *Penanganan Anak Tunagrahita (Kajian dari Segi Pendidikan, Sosial-Psikologis, dan Tindak Lanjut Usia Dewasa)*. Jurusan PLB FIP UNY.
- Munir Fuady Nurhadi. (2007). *Dinamika Teori Hukum (VIII)*. Ghalia Indonesia.
- Paingot Rambe Manalu et. Al. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.  
etd.eprints.ums.ac.id.
- Republika. (2004). *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. Republika.
- Said Sampara. (2011). *Said Sampara, Op Cit., hlm. 46. Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung*.
- Said Sampara dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (1987). *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *“Rule of Law.”* Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas

Sebelas Maret.

- Siswanto Sunarso. (2014). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Ke). Rajawali.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Sutjihati Somantri. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama.
- Tantowi Yahya. (2022). *Cek 4 Klasifikasi Disabilitas Intelektual*. YCHI AUTISM CENTER. <https://ychiautismcenter.org/isi-artikel/cek-4-klasifikasi-disabilitas-intelektual>
- Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Setara Press.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002a). *Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002b). *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002* (Vol. 1999, Issue 1).
- W.J.S. Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Yasmil Anwar dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran.

Yasmil Anwar. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Sumber Lainnya** **Jurnal**

Aminullah. 2016. *Implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat*. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Vol. 3, No. 1:620-628

Damanhuri Fattah. (2013). *‘Teori Keadilan Menurut John Rawls.’* Jurnal TAPIS  
2.

EMILDA KUSPRANINGRUM, H. R. S. (2007). *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Risalah Hukum, 1,  
3.

Fikry Latukau. (2019). *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem*

*Peradilan Pidana. LAHKIM, XV(1), 10.*

Geofani Milthree Saragih. (2022). *Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum, 11, 6.

Muhammad Ridwansyah. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi, 13(2 Juni 2016), 278.

Mumpuniarti. (2000). *Penanganan Anak Tunagrahita (Kajian dari Segi Pendidikan, Sosial-Psikologis, dan Tindak Lanjut Usia Dewasa)*. Jurusan PLB FIP UNY.

### **Internet**

Andi Munawarman. (n.d.). *Sejarah Singkat POLRI*.  
<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>

E. Iqbal Hasanuddin. (2018). *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1587764>

Tantowi Yahya. (2022). *Cek 4 Klasifikasi Disabilitas Intelektual*. YCHI AUTISM CENTER. <https://ychiautismcenter.org/isi-artikel/cek-4-klasifikasi-disabilitas-intelektual>

### **Thesis**

Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam*

*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*  
etd.eprints.ums.ac.id.

Setiono. (2004). "*Rule of Law.*" Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas  
Sebelas Maret.